



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Analisa Penyusunan Kebijakan Yang Responsif Gender
Dalam Penyusunan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Jawa Barat

Skripsi
Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh
Erik Dermawan
2015310012

Bandung
2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Analisa Penyusunan Kebijakan Yang Responsif Gender
Dalam Penyusunan Rencana Kerja
Dinas Pendidikan Jawa Barat

Skripsi

Oleh

Erik Dermawan

2015310012

Pembimbing

Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs., M.Si.

Bandung

2019

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Erik Dermawan
Nomor Pokok : 2015310012
Judul : Analisa Penyusunan Kebijakan Yang Responsif Gender
Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Jawa
Barat.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 18 Desember 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si. :

Pembimbing

Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si. :

Anggota

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA :

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo., M. Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erik Dermawan

NPM : 2015310012

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Analisa Penyusunan Kebijakan Yang Responsif Gender
Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan
Jawa Barat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 11 Desember 2019

Erik Dermawan

ABSTRAK

Nama : Erik Dermawan
NPM : 2015310012
Judul : Analisa Penyusunan Kebijakan Yang Responsif Gender
Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Jawa
Barat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyusunan rencana kerja di Dinas Pendidikan Jawa Barat sudah responsif gender. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Gender Analysis Pathway*. Untuk mengetahui apakah penyusunan rencana kerja sudah responsif gender dilihat dengan 2 (dua) aspek yaitu (1) faktor kesenjangan gender dan (2) penyebab kesenjangan yang terjadi di internal.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui : (1) wawancara dilakukan kepada 2 orang yang mewakili sub bagian perencanaan Dinas Pendidikan Jawa Barat, dan (2) menggunakan dokumen resmi dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Untuk menguji keabsahan data menggunakan konsep triangulasi sumber data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan rencana kerja di Dinas Pendidikan Jawa Barat sudah responsif gender tetapi masih terdapat kekurangan. Faktor kesenjangan yang ada adalah (1). Kurangnya pemahaman manfaat yang diterima dan derajat perubahan yang menjadi sebuah acuan. Serta untuk penyebab kesenjangan gender yang terjadi secara internal lembaga adalah (1) kurangnya sumber daya, (2) kepemimpinan dan (3) tingkat responsivitas. Selanjutnya, berdasarkan temuan bahwa pemahaman yang ada masih kompleks maka saran yang dapat diberikan adalah membentuk pemahaman yang lebih umum mengenai pengarusutamaan gender.

Kata kunci :Kebijakan Publik, Analisa Implementasi, Pengarusutamaan Gender, dan Rencana Kerja.

ABSTRACT

Name : Erik Dermawan
Student Nb. : 2015310012
Title : *Analysis of Gender Responsive Policy Formulation in the
Compilation of Work Plans of the West Java Education
Office*

The purpose of this research is to determine whether the preparation of work plans in the West Java Education Office is gender responsive. The analytical method used in this study is the Gender Analysis Pathway method. To find out whether the preparation of a work plan is gender responsive, it can be seen with 2 (two) aspects, namely (1) the gender gap factor and (2) the cause of the gap that occurs internally.

This research is a qualitative study by describing the data obtained. Data collection techniques were carried out through: (1) interviews conducted with 2 people representing the planning sub-division of the West Java Education Office, and (2) using official documents from the West Java Education Office. To test the validity of the data using the concept of triangulation of data sources.

The results of this study indicate that the preparation of work plans in the Department of Education in West Java is gender responsive but there are still shortages. The existing gap factor is (1). Lack of understanding of the benefits received and the degree of change that is a reference. As for the causes of gender disparities that occur internally within the institution are (1) lack of resources, (2) leadership and (3) responsiveness. Furthermore, based on the findings that the existing understanding is still complex, the advice that can be given is to form a more general understanding of gender mainstreaming.

Keywords: Public Policy, Implementation Analysis, Gender Mainstreaming, and Work Plans.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “Analisa Penyusunan Kebijakan Yang Responsif Gender Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Jawa Barat”.

Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran bahwa terciptanya skripsi ini adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan rahmatnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Ibu Hanny Wibowo selaku orang tua peneliti, terimakasih yang tak terhingga atas doa, kasih, pengorbanan, selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs., M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk membantu dan membimbing peneliti menyelesaikan penelitian ini.
4. Ibu Dr. Tutik Rachmawati. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
5. Seluruh dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Publik beserta staff Administasi Unpar yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga kelulusan peneliti.
6. Bapak Hendra Kusuma Sumantri.ST., MT. sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Jawa Barat.

7. Seluruh Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk peneliti melakukan penelitian.
8. Seluruh Jajaran Pengurus Banteng Muda Indonesia DPD DKI Jakarta.
9. Seluruh tim *Vizooel Production, Need Talk Podcast* dan Hagai Batara *Management*.
10. Rekan – rekan SMA Pangudi Luhur Jakarta. Kemon, Mandei, Ctrp dan Abst.
11. Teman - teman Publik 2015. Riki, Achram, Yan, Rifan, Carolina dan Ayesha.
12. Logistik SIAP Fisip. Dodit, Nando, Nadira, Tasya, Nizar, Louis, Ferry, Adit dan Nydi dan semua rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Lembaga Kepresidenan Mahasiswa periode 16/17.
14. Lembaga Kepresidenan Mahasiswa UNPAR periode 17/18.
15. Lembaga Kepresidenan Mahasiswa UNPAR AKSI 18/19.
16. Direktur Jenderal dan Staff Kementerian Kemahasiswaan LKM UNPAR Kabinet AKSI 18/19.
17. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis disebutkan satu per satu yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kepada semua pihak diharapkan saran dan kritik tentang skripsi ini.

Bandung, Desember 2019

Erik Dermawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR BAGAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Kegunaan Penelitian.....	4
1.4. Sistematika Penelitian	5
BAB II KERANGKA TEORI	7
2.1. Pengertian Kebijakan	7
2.2. Pengertian Kebijakan Publik.....	9
2.3. Implementasi Kebijakan Publik	11
2.4. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.5. Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	13
2.6. Gender Analysis Pathway	14
2.7. Model Penelitian	17
BAB II MODEL PENELITIAN.....	18
3.1. Jenis Penelitian.....	18
3.2. Peran Peneliti.....	19
3.3. Prosedur Pengumpulan Data	20
3.3.1. Wawancara.....	20
3.3.2. Studi Dokumen	21
3.4. Lokasi Penelitian	22
3.5. Narasumber	22
3.6. Pengecekan Keabsahan Temuan	22
3.7. Analisa Data	23
BAB IV GAMBARAN UMUM	25
4.1. Profil Dinas Pendidikan Jawa Barat.....	25
4.1.1. Sejarah Dinas Pendidikan Jawa Barat.....	25
4.1.2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Jawa Barat.....	26

4.1.3.	Moto Dinas Pendidikan Jawa Barat	27
4.1.4.	Logo Dinas Pendidikan Jawa Barat	27
4.2.	Rencana Kerja Dinas Pendidikan Jawa Barat	30
BAB V ANALISA RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN JAWA BARAT .		31
5.1.	Faktor Kesenjangan Gender	31
5.2.	Penyebab kesenjangan gender dari internal berdasarkan pada penyusunan rencana kerja	35
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		50
6.1.	Kesimpulan.....	50
6.2.	Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA		53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Kerja GAP	15
Gambar 4. 1 Logo Dinas Pendidikan Jawa Barat	27
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.	29
Gambar 5. 1 Alur Pikir PPRG.....	40
Gambar 5. 2 Presentasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) TA 2020 Penyusunan ARG 7 Agustus 2019.....	41
Gambar 5. 3 Presentasi KEMENPPA Strategi Percepatan Pelaksanaan PUG melalui PPRG di Daerah Agustus 2017.....	41
Gambar 5. 4 Presentasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) TA 2020 Penyusunan ARG 7 Agustus 2019.....	45
Gambar 5. 5 Presentasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) TA 2020 Penyusunan ARG 7 Agustus 2019.....	47
Gambar 5. 6 Presentasi KEMENPPA Strategi Percepatan Pelaksanaan PUG melalui PPRG di Daerah Agustus 2017.....	48
Gambar 5. 7 Presentasi Pedoman Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Dalam Menunjang Peraihan APE 2020	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional	56
Lampiran 2: Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.....	62
Lampiran 3: Panduan Wawancara	70
Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian KESBANGPOL Jawa Barat.....	71
Lampiran 5: Surat Izin Penelitian Dinas Pendidikan Jawa Barat	72
Lampiran 6: Data Narasumber.....	73
Lampiran 7: Transkrip Wawancara	74
Lampiran 8: Kartu Bimbingan Skripsi.....	77
Lampiran 9: Materi Presentasi Strategi Percepatan Pelaksanaan PUG Melalui PPRG Di Daerah.....	79
Lampiran 10: Materi Presentasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020	86
Lampiran 11: Materi Presentasi Pengawasan Perencanaan Dan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Dalam Menunjam Peraihan APE 2020.....	90
Lampiran 12: Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah.....	99

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Model Penelitian.....	17
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Jawa Barat Index Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2017 yang di dapatkan dari Badan Pusat Statistik berada dalam angka 70,69 sedangkan IPM Indonesia adalah 70,81. Selain IPM, Indeks Pembangunan Gender (IPG) memiliki acuan dimensi antara lain umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. Selain itu ada juga, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang memiliki acuan dimensi keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) provinsi Jawa Barat ada di angka 70,69 untuk IPG dan 70,04 IDG. Sementara untuk IPG Indonesia adalah 70,81 dan IDG Indonesia adalah 71,74, dapat dilihat sebuah angka yang masih berada di bawah angka Indonesia jika kedua hal tersebut di bandingkan.

Pengarusutamaan gender sendiri memiliki bidang yang sekurang -kurangnya yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, keterwakilan dan penegakan hukum. Sebuah analisis gender dalam perencanaan pembangunan dalam bidang pendidikan sangat penting untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada di bidang pendidikan yang disebutkan diatas. Hal yang sangat menarik dari hal tersebut adalah bagaimana PUG dapat di implementasikan dalam proses perencanaan daerah. PUG sendiri diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam beberapa bidang yang membutuhkan

perspektif gender dalam penyelesaian masalahnya. Maka dari itu pendidikan sebagai hal yang fundamental sangat penting untuk dapat dilihat dari segi PUG.

Setelah melihat kedua data tadi dapat dilihat bahwa keberhasilan implementasi dari kebijakan yang mengenai pembangunan manusia khususnya gender di Jawa Barat masih kurang. Pengarusutamaan gender sendiri memiliki fokus pada bidang kesehatan, pendidikan, hak asasi manusia dan keterwakilan di parlemen. Pendidikan adalah sebuah hal terpenting dalam mengatasi masalah ketimpangan gender. Karena dengan sebuah proses pendidikan yang baik maka dapat menjadi sebuah bentuk penyadaran dan pusat informasi untuk dapat menunjang masalah ketimpangan gender. Maka dari itu peneliti mengambil pendidikan karena pendidikan adalah proses dan menjadi inti dalam membangun pola pikir di masyarakat.

Dalam aspek pendidikan di Provinsi Jawa Barat salah satu indikator yang dapat melihat suatu ketimpangan gender yang ada adalah pada rata-rata lama sekolah (RLS) menurut jenis kelamin, di Jawa Barat tahun 2017 yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS). RLS pria adalah sebesar 8,59 tahun dan wanita adalah sebesar 7,69 tahun. Dalam menjalankan fungsi dan perannya pemerintah Jawa Barat memiliki banyak dinas untuk melaksanakan tugasnya. Untuk mengurus mengenai pendidikan pemerintah Jawa Barat memiliki dinas pendidikan provinsi Jawa Barat.

Dalam usaha untuk mencapai pembangunan serta pengembangan pendidikan di Jawa Barat, Pemerintah provinsi Jawa Barat memiliki sebuah rencana yang dibuat dalam sebuah perencanaan. Rencana dalam tingkat provinsi di Indonesia cukup beragam antara lain yaitu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah dengan periode waktu 20 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah dengan periode waktu 5 tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 tahun.

Selain hal tersebut Jawa Barat sendiri telah memiliki Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 mengenai pedoman teknis pengarusutamaan gender di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat. Maka dari itu dengan adanya peraturan ini seharusnya Jawa Barat mampu menyelesaikan masalah ketimpangan gender dengan nyata. Pada peraturan gubernur tersebut juga telah diatur mengenai pelaksanaan perencanaan yang responsif gender yang perlu dilaksanakan. Dalam proses perencanaan dapat menggunakan berbagai unit analisa. Salah satunya adalah dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP). GAP adalah sebuah analisa yang dapat menjadi sebuah analisa yang menekankan keadilan/ kesamarataan antara gender.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menggambarkan apakah pemerintah Jawa Barat lewat dinas pendidikan Jawa Barat melaksanakan rencana kerja yang responsif gender. Didasari oleh penjelasan diatas, maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian dari teori implementasi kebijakan publik dengan judul:

“Analisa Penyusunan Kebijakan Yang Responsif Gender Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Jawa Barat ”

1.2. Rumusan Masalah

Didasari dari judul dan latar belakang penelitian, Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah rencana kerja Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam tahap penyusunannya sudah responsif gender ?

Serta dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja faktor kesenjangan gender ?
2. Apakah penyebab kesenjangan gender dari internal berdasarkan pada penyusunan rencana kerja ?

1.3. Kegunaan Penelitian

a. Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan kritik untuk Pemerintah Jawa Barat mengenai implementasi perencanaan yang menekankan pengarusutamaan gender dalam organisasi perangkat daerah. Khususnya yaitu dalam rencana kerja Dinas Pendidikan Jawa Barat.

b. Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun teori yang didapat selama perkuliahan sehingga menjadi perbandingan antara ilmu pengetahuan dengan permasalahan yang ada di masyarakat.

1.4. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini membahas mengenai Analisa Rencana Kerja Yang Responsif Gender Dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Jawa Barat . Untuk itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, yaitu:

Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Kerangka Teori, berisi pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan publik, pendekatan implementasi kebijakan publik dan model penelitian.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan mengenai tipe penelitian, peran peneliti, lokasi penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan.

Bab IV Objek Penelitian, menjelaskan tentang gambaran umum dari “Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan gender dalam rencana kerja OPD pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat)”

Bab V Pembahasan Hasil Penelitian, menjelaskan tentang implementasi dari pengarusutamaan gender dan hasil penelitian serta data yang ada di lapangan.

VI Penutup, bagian ini mencoba menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.